

**PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DAN MASALAH
REKRUTMEN KPPS: STUDI KASUS DI KPU KOTA PADANG**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh :
Vini Marlina
BP. 1510831026

Dosen Pembimbing :
Dr. Asrinaldi, M.Si
Dr. Tengku Rika Valentina, MA



JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

VINI MARLINA, 1510831026. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul skripsi “Pelaksanaan Pemilu Serentak Dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus Di KPU Kota Padang”. Dibimbing Oleh: Dr. Asrinaldi M.Si dan Dr. Tengku Rika Valentina, MA. Skripsi ini terdiri dari 108 halaman, dengan 31 referensi: 10 buku, 8 jurnal, 13 sumber elektronik

Pemilihan Umum serentak tahun 2019 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berperan penting dalam menjamin hak politik masyarakat, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, beserta Badan *Ad Hoc*. Pada Pemilu 2019, banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah, terutama di Kota Padang yang mana harus melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 kecamatan. International IDEA Handbook mengatakan bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilu harus dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses Pemilu, yang mana terdapat dalam Prinsip-prinsip pedoman utama sebagai dasar bagi penyelenggaraan kepemiluan dan sangat esensial untuk menjamin integritas proses Pemilu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan perihal pembentukan dan pelatihan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa banyaknya PSU di Kota Padang terjadi karena keteledoran dari KPPS sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Kesalahan terjadi diakibatkan KPPS yang melupakan Bimbingan Teknis yang diberikan, serta ketidakpahaman KPPS terhadap aturan dan prosedur. Selain itu, KPPS termakan *hoax* yang beredar pada hari pencoblosan, membuat banyaknya orang yang memaksa memilih tapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai pemilih yang diperbolehkan oleh KPPS. Ini menandakan ketidaktegasan dari KPPS dalam mengambil keputusan. Namun secara keseluruhan, KPU Kota Padang beserta Badan *Ad Hoc* sudah menjalankan tugas sebagai penyelenggara sesuai dengan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, Kinerja KPU Kota Padang

ABSTRACT

VINI MARLINA, 1510831026. Undergraduate Thesis. Department of Politics, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title "Simultaneous Election Implementation And KPPS Recruitment Issues: Case Study In KPU Padang City". Guided by: Dr. Asrinaldi M.Sc and Dr. Tengku Rika Valentina, MA. This thesis consists of 108 pages, with 31 references: 10 books, 8 journals. 13 electronic sources.

The 2019 simultaneous general election is the Constitutional Court Decision Number 14 / PUUXI / 2013 which was held for the first time in Indonesia. The General Election Commission is an Election Management Institution that plays an important role in guaranteeing the political rights of the community, at the central, provincial, district / city levels, as well as the Ad Hoc Agency. In the 2019 Election, many mistakes were made by organizers at lower levels, especially in the City of Padang, which had to vote in 6 sub-districts. The International IDEA Handbook states that EMBs must be able to guarantee the legitimacy and credibility of the electoral process, which are contained in the main new Principles as the basis for electoral administration and are essential to ensuring the integrity of the electoral process. The purpose of this study is to analyze and describe the order and training of the Padang City General Election Commission Voting Organizing Group to support the implementation of the 2019 General Election with quality. This study uses a qualitative method with a case research type. The results of this study indicate that the number of PSUs in Padang City is due to negligence of the KPPS as the election organizer at the TPS level. The opinion that occurred was caused by the KPPS forgetting the technical guidance provided, as well as the KPPS 'lack of understanding of the rules and procedures. In addition, KPPS was consumed by deception on the day of voting, causing people to vote but not in accordance with the provisions of the voters allowed by KPPS. This indicates the indecisiveness of the KPPS in making decisions. However, in total, the Padang City KPU and the Ad Hoc Board have carried out their duties as organizers in accordance with the Election Organizing Principles.

Keyword: General election, Re-voting, Padang KPU Performance

